

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarana S-1**



Disusun Oleh :
Eva Saras Sati
NIM. 14.0102.0095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :
Eva Saras Sati
NIM. 14.0102.0095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

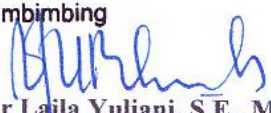
Eva Saras Sati

NPM 14.0102.0095

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

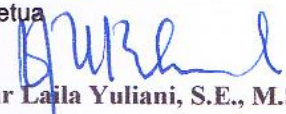
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji


Muh. Al Amin, S.E., M.Si.

Ketua


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Sekretaris


Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **03 OCT 2018**


Dra. Marlina Kurnia, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eva Saras Sati

NIM : 14.0102.0095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademi yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 2 Agustus 2018
Peneliti,

Eva Saras Sati
NIM. 14.0102.0095



RIWAYAT HIDUP

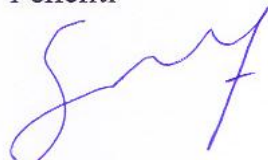
Nama : Eva Saras Sati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 26 Desember 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl Melati 108, Rt/w: 12/04, Mertoyudan, Kab. Magelang
Alamat Email : evasarassati2757@gmail.com

Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Mertoyudan
SMP : SMP Negeri 5 Magelang
SMA : SMA Negeri 2 Magelang
Perguruan Tinggi : S1 Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman organisasi :

- Anggota Devisi SDM Himpunan Mahasiswa Akuntansi (2014-2015)
- Pengurus Devisi SDM Himpunan Mahasiswa Akuntansi (2015-2016)
- Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2016-2017)
- Anggota Muda Mapala Mentari angkatan XIV (2014-2015)
- Sekretaris Paguyuban Muda Mudi Mertoyudan (2017)

Magelang, 2 Agustus 2018
Peneliti



Eva Saras Sati
NIM. 14.0102.0095

MOTTO

“Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah yang kamu dustakan
(QS. Ar-Rahman : 13)”

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.
(QS. Ibrahim : 7)”

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita
(Qs At-taubah : 40)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)**” Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Nur Laila Yuliani , SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
5. Para pegawai pada OPD Kabupaten Magelang atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Magelang, 29 juli 2018
Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Surat Pernyataan	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Telaah Teori	10
1. Teori <i>Agency</i>	10
2. Keandalan.....	11
3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
4. Sumber Daya Manusia	16
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
6. Pengendalian Intern akuntansi	18
7. Pengawasan Keuangan Daerah	19
8. Komitmen Organisasi.....	20

B. Telaah Penelitian Sebelumnya	22
C. Perumusan Hipotesis	25
D. Model Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Populasi dan Sampel	32
B. Teknik Pengambilan Sampel.....	32
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Sampel Penelitian.....	43
B. Statistik Deskriptif Responden.....	44
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	45
D. Uji Kualitas Data.....	47
E. Regresi Linier Berganda	49
F. Uji Hipotesis	50
G. Pembahasan.....	56
H. Pembahasan Menyeluruh	62
BAB V KESIMPULAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Keterbatasan	67
C. Saran	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Opini Pemeriksaan LKPD Kabupaten Magelang	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Definisi operasional dan pengukuran variabel.....	34
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	42
Tabel 4.2 Profil Responden.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.4 Tabel <i>Cross Loading</i>	46
Tabel 4.5 Pengujian Reabilitas.....	48
Tabel 4.6 Koefisien Regresi	49
Tabel 4.7 Uji R^2	49
Tabel 4.8 Uji F	50
Tabel 4.9 Uji t	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	31
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	41
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	41
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	51
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis SDM	52
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis PTI.....	52
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis PIA	53
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis PKD	54
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	70
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	78
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	79
Lampiran 4 Uji Validitas.....	84
Lampiran 5 Uji Reabilitas	89
Lampiran 6 Regresi	91
Lampiran 7 Tabel <i>Cross Loading</i>	92
Lampiran 8 Daftar OPD Kabupaten Magelang.....	94
Lampiran 9 Tanda Terima Kuesioner	95
Lampiran 10 Profil Responden	99

ABSTRAK

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)”

**Oleh:
Eva Saras Sati**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirim 82 kuesioner kepada pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan. Kuesioner kembali sebanyak 79 responden atau sebesar 91,46%, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebesar 48 responden atau sebesar 60,76%. Data diolah menggunakan SPSS 23 dengan Regresi Linier Berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

Kata kunci: sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian inten akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan keandalan pelaporan keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di era globalisasi dan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata mendorong pemerintah untuk terus menyelenggarakan wujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Wardani & Andriyani, 2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan dengan adanya laporan keuangan pemerintah yang memiliki kualitas informasi sehingga dapat digunakan sebagai tindakan pengambilan keputusan oleh publik. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standard Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah terdiri dari: 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan, 4) Dapat Dipahami.

Menurut Yusrawati & Cahyanti (2016) laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memperhatikan penyajian laporan keuangan yang memiliki nilai informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Salah satu karakteristik kualitatif

yang sangat berkaitan dengan nilai informasi dalam laporan keuangan pemerintah yaitu keandalan. Sebuah laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi tersebut tidak andal. Keandalan merupakan suatu kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Wardani & Andriyani, 2017).

Keandalan pelaporan keuangan menarik untuk diteliti dikarenakan masih banyaknya kasus penyelewengan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,13 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain mengakibatkan kerugian permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp 419,60 miliar, 846 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 537,72 miliar, serta 2.331 permasalahan penyimpangan administrasi. Atas LKPD tahun 2016, 375 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 139 LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, dan 23 LKPD mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (BPK, 2017).

Kabupaten Magelang sendiri memperoleh hasil audit laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2016. Hal ini merupakan pencapaian yang baik bagi Kabupaten Magelang setelah 4 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada

tahun 2012-2015 (BPK, 2017). Berikut daftar tabel opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2016:

Tabel 1.1
Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Magelang

Tahun	Opini
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: semarang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang dapat diteliti, khususnya dalam hal keandalan pelaporannya. Peningkatan kualitas pelaporan dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa sebuah pemerintah daerah sudah memberikan pelaporan keuangan daerah yang andal.

Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun di Kabupaten Magelang masih terdapat permasalahan dalam pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data. Diketahui penemuan masalah pengendalian aset tersebut berada di Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan. Kemudian, Kelurahan Secang, Kelurahan Muntilan, Kelurahan Sumberrejo, Kelurahan Sawitan dan Kelurahan Mendut (radarsemarang.com, 2017). Oleh karena hal

tersebut, pemerintah masih memerlukan penyajian pelaporan keuangan yang andal sehingga masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar atau *valid* (Wardani & Andriyani, 2017).

Penelitian mengenai keandalan pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan. Penelitian Fransiska (2015) tentang pengaruh sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi, menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian Azlan, dkk (2015) tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yusrawati & Cahyanti (2016) menjelaskan bahwa kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam penelitian Dodopo, dkk (2017) dijelaskan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern akuntansi, peran internal audit, pendidikan, dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian selanjutnya yaitu dari Wardani & Andriyani (2017) yang menjelaskan mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi. Hasil dari penelitiannya yaitu kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh

positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Namun, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wardani & Andriyani (2017). Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan semua variabel yang ada pada penelitian Wardani & Andriyani (2017). Perbedaannya yaitu **Pertama**, menambahkan variabel pengawasan keuangan daerah berdasarkan pada permasalahan di Kabupaten Magelang dalam pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data (radarsemarang.com, 2017).

Pengawasan keuangan daerah memberikan pengawasan atas rencana yang telah ditentukan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka diharapkan pemerintah dapat meminimalisir ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain hal tersebut, pengawasan keuangan daerah menanggulangi permasalahan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah itu sendiri (Fransiska, 2015). Penambahan variabel pengawasan keuangan daerah ini sesuai dengan penelitian Desmiyawati (2014), Fransiska (2015), dan Azlan, dkk (2015)

Kedua, menambahkan variabel komitmen organisasi karena, dengan adanya komitmen organisasi karyawan dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selain hal tersebut, komitmen organisasi sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, dimana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya

(Azlan, dkk 2015). Komitmen yang tinggi dari pegawai akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi yang andal (Yuliani dkk, 2016). Penambahan variabel komitmen organisasi ini sesuai dengan penelitian Fransiska (2015), Yuliani, dkk (2016) dan Dodopo, dkk (2017).

Ketiga, objek yang dipilih di OPD Kabupaten Magelang karena hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magelang diketahui mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012-2015 dan baru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 (www.bpkp.go.id/diy). Selain hal tersebut, adanya permasalahan dalam pengendalian aset daerah yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan data dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang menjadi alasan diperlukannya laporan keuangan yang andal dengan harapan dapat diakses dengan mudah oleh publik dan mudah dipahami sehingga pengguna laporan keuangan khususnya masyarakat dapat percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
2. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
3. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
4. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
5. Menguji dan membuktikan secara empiris komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan materi pengetahuan dan wawasan mengenai masalah mengenai keandalan pelaporan keuangan daerah.
- b. Hasil penelitian dapat menambah sumber referensi kajian teori, sumber informasi, peran penelitian mengenai keandalan pelaporan keuangan daerah.
- c. Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi mengenai pelaporan keuangan yang andal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang melandasi penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi

Mardiasmo (2004:29) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah merupakan *agent* yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh legislatif dan masyarakat selaku *principal*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggaran Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self *interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai memperlihatkan bahwa

kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan tidak menyukai resiko .

Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (Azlan, dkk 2015). Teori keagenan juga menyatakan bahwa *agent* bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan yang andal (Fransiska, 2015).

2. Keandalan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa laporan yang andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Pelaporan keuangan daerah dikategorikan sebagai laporan keuangan yang andal apabila informasi laporan keuangan yang disajikan memiliki kandungan informasi yang benar dan valid (Suwardjono, 2006). Informasi yang memiliki kualitas bagus adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan (Mahmudi, 2007). Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan (Fransiska, 2015). Keandalan pelaporan keuangan dapat diukur dengan kualitas nilai informasi laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

FASB (Financial Accounting Standart Board) menerbitkan delapan SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis. Salah satunya

yaitu menjelaskan karakteristik kualitatif SFAC No.2 dari informasi akuntansi. Dijelaskan dalam SFAC No. 2 (1980), *Qualitative Characteristics Of Accounting Information* bahwa dalam penyajian laporan keuangan, setidaknya laporan keuangan harus mencakup dua kualitas spesifik keputusan primer, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*). Terdapat tiga aspek dalam nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictivevalue*). Sedangkan dalam keandalan (*reliability*) juga mencakup tiga aspek yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*).

SFAC No.8 merupakan salah satu dari serangkaian publikasi di FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan yang mencakup dua bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC No.1, tujuan pelaporan keuangan oleh Business Enterprises, dan SFAC No.2 yang meliputi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. SFAC No.8 dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang akan menjadi dasar untuk pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan (Wiley & Sons, 2004).

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial

negara (Suwardjono, 2006). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Ulum & Sofyani, 2016). Diketahui dalam pasal 33 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Laporan Realisasi APBN/D, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran Laporan Keuangan perusahaan negara/daerah. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen: Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- 4) Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*): membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- 5) Evaluasi Kinerja: mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Komponen laporan keuangan sektor publik berbeda dengan komponen laporan keuangan sektor swasta, berikut merupakan komponen pokok laporan keuangan sektor publik:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah semua orang yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan perusahaan, dan juga orang-orang yang bisa berkontribusi di masa mendatang, dan mereka yang telah berkontribusi di masa lalu (Jackson dkk, 2010). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi, dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada (Yadnya dkk, 2017). Pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan publik memiliki pengukuran yang sebanding dengan sumberdaya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian. Pengembangan sumber daya manusia, dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme (Fransiska, 2015).

Sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dalam mengelola laporan keuangan. Kemampuan dari sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan tentunya diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang kompeten dan independen.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005). Pemanfaatan Teknologi Informasi diperlukan dalam era globalisasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi keuangan menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (Azlan dkk, 2015). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan dan menghasilkan data yang lebih akurat serta konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan sistem manual.

Teknologi informasi termasuk sistem informasi berbasis internet, memainkan peranan penting dan luas. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah (O'Brien, 2005). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memperlancar kegiatan pemrosesan data, penyimpanan data, dan penyebaran informasi dengan mudah sehingga diharapkan dapat memberikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.

6. Pengendalian Intern Akuntansi

Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016). Pengendalian Internal dijelaskan pada PP Nomor 60/2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu SPIP harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai (Azlan dkk, 2015). Hal ini diharapkan pemerintah dapat menghasilkan pengendalian internal yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Pengendalian intern melingkupi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan pengendalian intern terbagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Selain dua hal tersebut tujuan pengendalian intern yaitu untuk

pengendalian intern akuntansi yaitu untuk menjaga kekayaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Dengan hal tersebut pengendalian atas kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara diharapkan menghasilkan sebuah pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akutabel.

7. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Baswir (1995) dalam Ulum & Sofyani (2016) menjelaskan bahwa pengawasan adalah adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Hasil dari pengawasan digunakan untuk membandingkan kinerja yang dilakukan, upaya untuk menanggulangi kesalahan/kejadian yang menyimpang dan mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat mengontrol kegiatan OPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan dimaksudkan, agar pemerintah daerah melakukan tugas

dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam mengelola keuangan. Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara, dilakukan berdasarkan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah pasal 23 ayat 1 UU No.25 tahun 1999 (Ulum & Sofyani, 2016).

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Adanya pengawasan keuangan daerah memberikan pengendalian atas kegiatan OPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat diandalkan.

8. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins & Judge, 2008). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Yuliani, Farida, & Susanto, 2015). Menurut Mowday, dkk (1982) dalam Dodopo, dkk (2017) menyatakan bahwa komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan

sasaran yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Anam, 2017).

Komitmen organisasi penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Komitmen organisasi yang dimaksudkan yaitu aparatur pemerintahan, keterlibatan kerja aparatur pemerintahan yang baik maka dapat memiliki arti bahwa keberpihakan kepada organisasi juga tinggi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan penurunan kinerja dapat dihindari. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan mementingkan dirinya atau kelompoknya, dimana individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi kearah yang lebih baik, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan kinerja (Fransiska, 2015). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik kepada pemerintah sehingga dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Desmiyawati (2014)	Dependen: Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Independen: Sumber Daya Manusia Pengawasan Laporan Keuangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sumber daya manusia dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Fransiska (2015)	Dependen: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Independen: Sumber Daya Manusia Pengawasan Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi Komitmen Organisasi	Sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
3.	Azlan, dkk (2015)	Dependen: Keandalan Pelaporan Independen: Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Intern Akuntansi Pengawasan Keuangan Daerah	Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian inten akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
4.	Yuliani, dkk (2016)	Dependen: Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Independen: Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Intern Akuntansi Komitmen Organisasi Perangkat Pendukung	Sumber daya manusia, pengendalian inten akuntansi, komitmen organisasi dan perangkat pendukung berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan. Pengendalian inten akuntansi, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap timeliness pelaporan keuangan. Sedangkan Sumber daya manusia, dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan.
5.	Yusrawati & Cahyanti (2016)	Dependen: Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Independen: Kapasitas Sumber daya manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Intern Akuntansi	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
6.	Wardani & Andriyani (2017)	Dependen: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
		Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern	berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Sementara pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
7.	Dodopo, dkk (2017)	Dependen: Keterandalan Laporan Keuangan Independen: Komitmen Organisasi Pengendalian Intern Akuntansi Peran Internal Audit Pendidikan Kualitas Pelatihan	Komitmen organisasi, pengendalian intern akuntansi, peran internal audit, pendidikan, dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
8.	Yadnya dkk, (2017)	Dependen: Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Independen: Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengendalian Intern	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi NTB)

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah semua orang yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan perusahaan, dan juga orang-orang yang bisa berkontribusi di masa mendatang, dan mereka yang telah berkontribusi di masa lalu (Jackson dkk, 2010). Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia sendiri yang mengendalikan yang lain (Hariandja, 2002). Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu aparatur pemerintah daerah dipercaya pemerintah dan masyarakat untuk melaporkan keuangan daerah yang dapat diandalkan.

Sumber daya manusia memiliki keahlian dalam melaksanakan sistem akuntansi dapat menimbulkan hambatan jika pemahaman penerapan ilmu akuntansinya rendah. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan terpenuhinya kualitas sebuah laporan keuangan (*agent*) sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh pihak *principal*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan sehingga dapat diandalkan.

Hal ini didasarkan pada penelitian Desmiyawati (2014), Fransiska (2015), Azlan, dkk (2015), Yuliani, dkk (2016), Yusrawati & Cahyanti (2016), Wardani & Andriyani (2017) dan Yadnya, dkk (2017) menyatakan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005). Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan Teknologi yang semakin pesat dapat membantu aparatur dalam memproses, menyimpan, memberikan, dan menyajikan laporan keuangan.

Sesuai dengan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan keagenan mengenai suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesuatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agent*

untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*, maka diperlukan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak optimal dalam menggunakan teknologi informasi tersebut sehingga dapat mengakibatkan ketidak andalan laporan keuangan yang di berikan kepada pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dapat menjadi konflik yang terjadi kepada *agent* dan *principal*. Konflik tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi secara optimal oleh pemerintah dengan beberapa faktor yang mendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik juga pemerintah dalam memberikan laporan keuangan yang andal.

Hal ini didasarkan pada penelitian Fransiska (2015), Azlan, dkk (2015), Yusrawati & Cahyanti (2016) dan Yadnya, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah.

c. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang

dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016).

Kurangnya arahan terhadap sumber daya manusia terhadap tujuan yang ditentukan pemerintahan dapat menimbulkan konflik diantara suatu organisasi pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dapat memberikan arahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah (*agent*) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan (*principal*). Hal ini menunjukkan semakin baik pengendalian intern akuntansi maka semakin baik juga pemerintah dalam memberikan laporan keuangan yang andal.

Hal ini didasarkan pada penelitian Azlan, dkk (2015), Yuliani, dkk (2016), Yusrawati & Cahyanti (2016), Wardani & Andriyani (2017), Dodopo, dkk (2017) dan Yadnya, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah.

d. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Baswir (1995) dalam Ulum & Sofyani (2016) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Banyak hal yang dapat disalahgunakan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah. Dengan penyalahgunaan tersebut dapat diduga menimbulkan konflik antara *principal* dengan *agent*. Oleh karena hal tersebut diperlukan pengawasan sebagai kendali penyelewengan yang dapat terjadi dikarenakan aparatur pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah dapat mengendalikan konflik sehingga dalam pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan (*agent*) yang wajar terhadap efisiensi dan efektivitas dari laporan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak *principal*. Hal ini menunjukkan semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik juga pemerintah dalam memberikan laporan keuangan yang andal.

Hal ini didasarkan pada penelitian Desmiyawati (2014), Fransiska (2015), dan Azlan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah

e. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins & Judge, 2008). Aparatur pemerintahan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik kepada pemerintah sehingga dalam pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

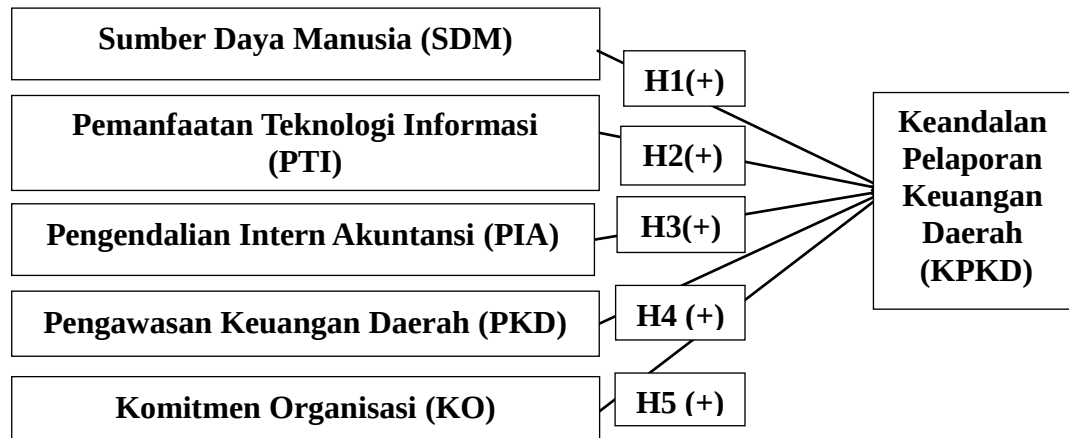
Aparatur yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan organisasi merupakan bentuk konflik yang terjadi dalam sebuah kinerja aparatur pemerintahan. Oleh karena hal tersebut perlu komitmen organisasi untuk memberikan komitmen yang tinggi sehingga menghasilkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah (*agent*) sehingga dapat diandalkan dalam

pengambilan keputusan oleh pihak *principal*. Komitmen yang tinggi dari pegawai akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi yang andal (Yuliani dkk, 2016).

Hal ini didasarkan pada penelitian Fransiska (2015), Yuliani, dkk (2016) dan Dodopo, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada OPD Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Telah bekerja di bidang keuangan untuk melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada OPD Pemerintah Kabupaten Magelang minimal 1 tahun.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014).

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden dengan diantar langsung oleh peneliti. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen:		
Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (KPKD)	Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas bagus adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur (<i>faithful representation</i>) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan (Mahmudi, 2007)	Instrumen dengan jumlah 7 butir pernyataan diambil dari Indriasari & Nahartyo (2008) dengan indikator sebagai berikut : a. Penyajian jujur b. Realisasi c. Rekonsiliasi d. Informasi dapat diuji e. Netralisasi f. Pengarahan sistem informasi Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.
Variabel Independen:		
Sumber Daya Manusia (SDM)	Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuannya (Susilo, 2002).	Instrumen dengan jumlah 10 butir pernyataan diambil dari GTZ & USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Indriasari & Nahartyo (2008) dengan indikator sebagai berikut : a. Kemampuan individu b. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan c. Memahami prosedur dan proses akuntansi Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Tabel 3.1
Definisi operasional dan pengukuran variable
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi (Wilkinson, 2005).	Instrumen dengan jumlah 7 butir pernyataan diambil dari Jurnal dan Supomo (2002) dalam Indriasari & Nahartyo (2008) dengan indikator sebagai berikut : a. Proses kerja secara elektronik b. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan c. Pengolahan informasi dengan jaringan internet d. Sistem manajemen e. Perawatan & pemeliharaan pada perangkat komputer. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.
Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)	Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,	Instrumen dengan jumlah 9 butir pernyataan diambil dari Indriasari & Nahartyo (2008) dengan indikator sebagai berikut : a. Perencanaan yang memadai b. Pemisahan wewenang c. Tidakan disiplin atas pelanggaran. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Tabel 3.1
Definisi operasional dan pengukuran variable
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Pengawasan Keuangan Daerah (PKD)	mendorong efesiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016). Menurut Baswir (1995) dalam Ulum & Sofyani (2016) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.	Instrumen dengan jumlah 10 butir pernyataan diambil dari Arfianti (2010) dengan indikator sebagai berikut : - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN - Evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi - Berdasarkan bukti - Pencatatan transaksi yang tepat waktu - Dokumentasi bukti transaksi - Sistem pengawasan pelaksanaan tugas - Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.
Komitmen Organisasi (KO)	Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seora(Yuliani et al., 2015)ng karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins & Judge, 2008)	Instrumen dengan jumlah 8 butir pernyataan diambil dari Newstroom (1989) dalam Yuliani, dkk (2015) dalam dengan indikator sebagai berikut : - Loyalitas - Kebanggaan terhadap perusahaan - Meningkatkan Kinerja

Tabel 3.1
Definisi operasional dan pengukuran variable
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
		Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 point, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju, sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

1. Alat Analisis

a. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2016:19).

b. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ghozali (2016: 52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory*

Factor Analysis (CFA). CFA merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak. Kriteria pada CFA adalah:

- a) Melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur faktornya dengan melihat nilai t bagi koefisien muatan faktor item. Perbandingannya adalah $t > 1,95$, maka item tersebut signifikan dan sebaliknya. Apabila item tersebut signifikan maka item tidak akan di *drop* dan sebaliknya.
- b) Melihat koefisien muatan faktor dari item. Jika item tersebut sudah di skoring dengan dengan *favorable* (pada skala likert 1-4), maka nilai koefisien muatan faktor pada item harus bermuatan positif dan sebaliknya. Apabila item tersebut *favorable*, namun koefisien muatan faktor item bernilai negatif maka item tersebut di *drop* dan sebaliknya.
- c) Apabila kesalahan pengukuran item terlalu banyak berkolasi, maka item tersebut di *drop*. Sebab yang demikian selain mengukur apa yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghazali (2016: 43), yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* $\leq 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus; pertama meminimumkan penyimpangan antara nilai actual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2016:95). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$\text{KPKD} = \beta_1 \text{SDM} + \beta_2 \text{PTI} + \beta_3 \text{PIA} + \beta_4 \text{PKD} + \beta_5 \text{KO} + e$$

Keterangan :

KPKD	= Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah
$\beta_1, \dots, \beta_5$	= Koefisien Regresi dari X
SDM	= Sumber Daya Manusia
PIA	= Pengendalian Intern Akuntansi
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
PKD	= Pengawasan Keuangan Daerah
KO	= Komitmen Organisasi
<i>e</i>	= error / residual

d. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2016 : 95).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

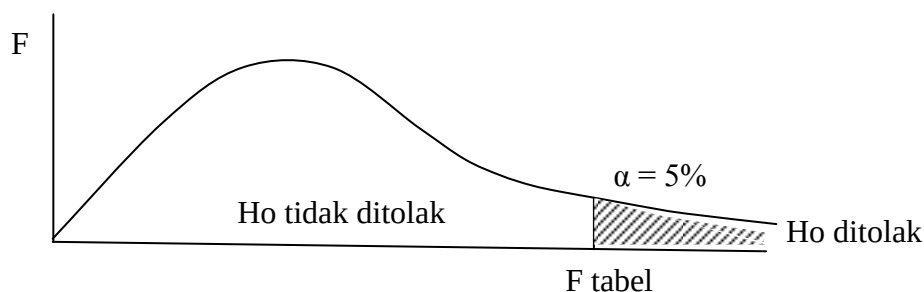
2) Uji F (*Goodness of fit test*)

Nilai F digunakan untuk menguji ketepatan model (*Goodness of fit*). Uji F ini sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok

(*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat bebas $df: \alpha, (k-1), (n-k)$.

Menurut (Suliyanto, 2011), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X_1 , X_2 , dan X_n berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika signifikansi $< 0,05$ maka hal tersebut signifikan, modelnya fit, dan layak digunakan dalam penelitian.
- Jika signifikansi $> 0,05$ maka hal tersebut tidak signifikan, modelnya tidak fit, dan tidak layak digunakan dalam penelitian



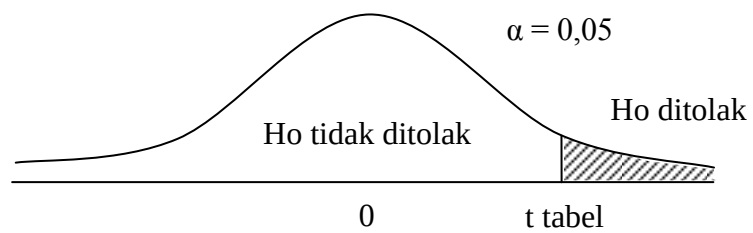
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3) Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016: 97). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-1$ sebagai berikut:

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sampel yang diambil dan dapat diolah dalam penelitian ini berjumlah 48 pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu kepala bagian dan staff bagian keuangan atau akuntansi.

Hasil Uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* sebesar 0,645, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi dalam menjelaskan variasi keandalan pelaporan keuangan daerah sebesar 64,5% sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Hasil Uji F menunjukkan menunjukkan bahwa model yang digunakan telah bagus (*fit*). Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

Sumber

daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

B. Keterbatasan

1. Objek penelitian terbatas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
2. Terbatasnya penelitian yang hanya meneliti 5 variabel independen yang berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian misalnya OPD se- Wilayah Kedu.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karena SAP digunakan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan Auditor BPK sehingga dapat membantu pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, N. (2017). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada PT. New Ratna Motor)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Anonim. (n.d.). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno MM Desak Perbaiki Sistem Manajemen Aset. Retrieved May 31, 2018, from radarsemarang.com
- Arfianti,Dita. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Azlan, M., Hernawati, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi,Dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 3, 188–198.
- BPK. (n.d.-a). LHP LKPD. Retrieved from semarang.bpk.go.id
- BPK. (2017). Media Workshop “Mekanisme Pemberian Opini atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa”. Retrieved from www.semarang.bpk.go.id/?=9923
- BPK, S. P. (n.d.-b). BPK menemukan 2.537 masalah berdampak Financial senilai Rp 9,87 triliun. Retrieved from www.bpk.go.id
- Desmiyawati. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris pada SKPD Pemda Riau), 2(2), 163–178.
- Dodopo, Y., Sondakh, J. J., & Tinangon, J. J. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, 8(1), 22–31. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Fransiska. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jom FEKON*, 2, 1–15.

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. (B.P.U. Diponegoro, Ed.). Semarang.
- Hariandja, M. T. E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasioanal Akuntansi XI*.
- Jackson, S. E., Sculer, R. S., & Werner, S. (2010). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, & Meckling. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, 3(305–360).
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (STIM YKPN). Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- O'Brien, J. A. (2005). *Introduction to Information System* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Konsep dan Implementasi-Untuk Akademisi dan Praktisi)*. Yogyakarta: LP3M-UMY.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, W. (2002). *Audit Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gema Armini.
- Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE:Yogyakarta.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten, 5(110), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>

Wilkinson, J. W. (2005). *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Jakarta: Erlangga.

Yadnya, N. W. A., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat), 8.

Yuliani, N. L., Farida, & Susanto, B. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Wilayah Kedu).

Yuliani, N. L., Susanto, B., & Farida. (2016). Analisis Determinasi Keandalan dan Timeliness, 4(2), 145–160.

Yusrawati, & Cahyanti, N. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi, Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir), 26(1), 44–62.

